



Dampak Subsidi Energi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Indonesia

Adelia Gusfira¹, Hasanatun Fitri², Ahmad Wahyudi Zein³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235.

Korespondensi penulis: ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id

Abstract. Energy subsidy policy has become one of the key strategies of the Indonesian government in its efforts to improve public welfare, particularly for low-income groups. By subsidizing fuel (BBM), 3-kg LPG, and electricity tariffs, the government aims to stabilize energy prices to make them more affordable for the poor. However, the effectiveness of this policy in achieving social welfare goals remains debatable, especially regarding the accuracy of subsidy distribution. This study aims to analyze the impact of energy subsidies on the welfare of poor households in Indonesia using both qualitative and quantitative approaches based on secondary data from BPS, the Ministry of Finance, and reports from international institutions such as the World Bank and the IMF. The analysis shows that although energy subsidies provide direct benefits by reducing the household expenses of the poor, a significant portion of the subsidies is actually enjoyed by middle- and high-income households. This unequal distribution reduces the effectiveness of subsidies as a tool for promoting welfare equity. Therefore, reform of energy subsidy policies is needed to improve targeting accuracy, such as by converting subsidies into direct cash transfers based on social data. These findings offer important implications for the formulation of more efficient and equitable fiscal and social protection policies in the future.

Keywords: Energy Subsidy, Welfare, Poor Households, Fiscal Policy, Subsidy Distribution, Indonesia.

Abstrak. Kebijakan subsidi energi telah menjadi salah satu strategi utama pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Melalui subsidi terhadap bahan bakar minyak (BBM), elpiji 3 kg, dan tarif listrik bersubsidi, pemerintah berusaha menstabilkan harga energi agar lebih terjangkau oleh masyarakat miskin. Namun, efektivitas kebijakan ini dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial masih menimbulkan perdebatan, terutama terkait ketepatan sasaran distribusi subsidi tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak subsidi energi terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif berbasis data sekunder dari BPS, Kementerian Keuangan, dan laporan lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun subsidi energi memberikan manfaat langsung dalam meringankan pengeluaran rumah tangga miskin, sebagian besar subsidi justru dinikmati oleh rumah tangga berpendapatan menengah dan tinggi. Ketimpangan distribusi ini membuat subsidi menjadi kurang efektif sebagai alat pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, reformasi kebijakan subsidi energi diperlukan agar lebih tepat sasaran, misalnya dengan pengalihan subsidi menjadi bantuan langsung tunai berbasis data sosial. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan fiskal dan perlindungan sosial yang lebih efisien dan adil di masa mendatang.

Kata kunci: Subsidi Energi, Kesejahteraan, Rumah Tangga Miskin, Kebijakan Fiskal, Distribusi Subsidi, Indonesia

1. LATAR BELAKANG

Energi merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial sebuah negara. Tanpa akses yang memadai terhadap energi, terutama energi yang terjangkau dan andal, masyarakat akan kesulitan meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan kualitas hidup mereka. Di negara berkembang seperti Indonesia, ketersediaan dan keterjangkauan energi bagi seluruh lapisan masyarakat masih menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasi kesenjangan ini, pemerintah telah lama mengimplementasikan kebijakan subsidi energi,

khususnya untuk bahan bakar minyak (BBM), elpiji tabung 3 kg, dan tarif listrik untuk rumah tangga kecil.

Kebijakan subsidi energi pada dasarnya ditujukan untuk menjaga harga energi tetap rendah, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Dengan subsidi ini, pemerintah berharap beban pengeluaran rumah tangga miskin bisa ditekan, sehingga mereka memiliki ruang lebih untuk memenuhi kebutuhan lain seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, subsidi energi juga dipandang sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah gejolak sosial akibat kenaikan harga komoditas penting. Dalam konteks Indonesia yang memiliki ketimpangan pendapatan cukup besar, subsidi sering kali dianggap sebagai alat untuk memperkuat keadilan sosial.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas subsidi energi dalam mencapai tujuan tersebut masih menjadi perdebatan. Banyak studi menunjukkan bahwa subsidi energi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat dengan tingkat konsumsi energi yang lebih tinggi, yaitu rumah tangga kelas menengah dan atas. Hal ini disebabkan oleh pola konsumsi energi yang meningkat seiring dengan pendapatan. Misalnya, rumah tangga kaya cenderung memiliki kendaraan pribadi dan peralatan listrik yang lebih banyak, sehingga mereka secara tidak langsung mendapatkan bagian subsidi yang lebih besar. Situasi ini menimbulkan paradoks, di mana subsidi yang seharusnya membantu kelompok miskin malah memperbesar ketimpangan karena lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang tidak membutuhkannya.

Di sisi lain, beban subsidi terhadap anggaran negara juga tidak bisa dianggap ringan. Setiap tahun, alokasi dana untuk subsidi energi menghabiskan triliunan rupiah dari APBN. Dana sebesar ini seharusnya dapat dialihkan untuk sektor-sektor prioritas lain seperti pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan berkualitas, dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Ketergantungan pada subsidi energi yang tidak efisien juga bisa menghambat upaya transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan, karena harga energi yang terlalu murah mengurangi insentif untuk efisiensi dan inovasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah-langkah reformasi terhadap kebijakan subsidi energi. Salah satunya adalah pengalihan sebagian subsidi BBM menjadi bantuan sosial tunai dan program perlindungan sosial lainnya yang berbasis data terpadu. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Namun, proses reformasi ini tentu tidak mudah. Penyesuaian harga energi kerap kali menimbulkan resistensi publik, terutama karena

ketidakpercayaan terhadap mekanisme distribusi bantuan dan kekhawatiran terhadap dampak inflasi.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap dampak subsidi energi terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan subsidi energi memberikan manfaat nyata bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, serta menilai apakah subsidi tersebut merupakan cara yang paling efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, studi ini juga mencoba melihat alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka menciptakan sistem subsidi yang lebih adil, tepat sasaran, dan mendukung keberlanjutan fiskal. Dengan mengkaji berbagai sumber data dan literatur ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyusun kebijakan energi yang tidak hanya responsif secara sosial, tetapi juga adaptif terhadap tantangan ekonomi masa depan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menganalisis data sekunder yang diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah dan sumber resmi. Fokus utama dari metode ini adalah mengevaluasi dampak subsidi energi terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia melalui kajian literatur dan telaah mendalam terhadap data yang relevan. Beberapa jurnal ilmiah dijadikan sebagai rujukan utama untuk mendukung kerangka analisis dan pembahasan, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur (library research) dan analisis data sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Subsidi Energi

Subsidi energi merupakan salah satu instrumen kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan harga energi agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Kebijakan ini telah menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan berbagai negara, terutama negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam praktiknya, subsidi energi diberikan dalam berbagai bentuk, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, maupun gas rumah tangga. Meski bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, pelaksanaan subsidi energi sering kali menimbulkan pro dan kontra karena dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkannya.

Secara umum, subsidi dapat diartikan sebagai bantuan keuangan dari pemerintah kepada individu, kelompok, atau sektor tertentu dengan tujuan untuk menurunkan harga atau

meningkatkan kesejahteraan penerima. Dalam konteks energi, subsidi berarti campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar untuk mengurangi harga energi yang dibayar oleh konsumen atau meningkatkan keuntungan produsen energi. Subsidi energi bisa berupa subsidi langsung maupun tidak langsung. Subsidi langsung contohnya adalah pemberian dana tunai kepada badan usaha milik negara (BUMN) energi untuk menutupi selisih antara harga pasar dan harga jual ke konsumen. Sementara itu, subsidi tidak langsung bisa berupa pengurangan pajak, pembebasan bea masuk untuk peralatan energi, atau penetapan harga jual yang lebih rendah dari biaya produksi.

Menurut International Energy Agency (IEA), subsidi energi didefinisikan sebagai tindakan pemerintah yang menurunkan harga energi secara artifisial dibandingkan dengan harga pasar. Tujuannya bisa bermacam-macam, mulai dari membantu kelompok masyarakat miskin, menjaga stabilitas harga, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, intervensi ini juga dapat menyebabkan distorsi pasar, pemborosan energi, dan tekanan terhadap anggaran negara.

Teori Ekonomi Terkait Subsidi

Subsidi merupakan bagian penting dalam kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memengaruhi perilaku pasar dan distribusi sumber daya. Dalam teori ekonomi, subsidi tidak hanya dipandang sebagai alat bantu fiskal, tetapi juga sebagai mekanisme intervensi yang memengaruhi keseimbangan harga dan kuantitas barang atau jasa dalam suatu perekonomian. Untuk memahami dampak dan rasionalitas subsidi, penting untuk meninjau sejumlah teori ekonomi yang relevan, terutama yang berkaitan dengan teori harga, distribusi, efisiensi, dan kesejahteraan.

1. Teori Harga dan Distorsi Pasar

Dalam mekanisme pasar bebas, harga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Subsidi, dalam konteks ini, merupakan bentuk distorsi karena menyebabkan harga suatu barang atau jasa menjadi lebih rendah daripada harga keseimbangan pasar. Hal ini dijelaskan dalam teori harga oleh Alfred Marshall, di mana campur tangan pemerintah seperti subsidi dapat menggeser kurva penawaran atau permintaan. Sebagai contoh, jika pemerintah memberikan subsidi kepada produsen, maka biaya produksi efektif menjadi lebih rendah, dan produsen cenderung menjual lebih banyak barang dengan harga lebih murah. Sebaliknya, jika subsidi diberikan kepada konsumen, maka daya beli mereka meningkat, sehingga permintaan terhadap barang bersubsidi naik. Akibatnya, jumlah barang yang dikonsumsi bisa meningkat melebihi tingkat konsumsi yang efisien secara ekonomi. Meskipun hal ini dapat membantu

menstabilkan harga dan melindungi kelompok rentan, distorsi harga yang berkepanjangan bisa mengarah pada ketidakefisienan, karena konsumsi tidak mencerminkan kelangkaan sumber daya yang sebenarnya.

2. Teori Distribusi dan Keadilan Sosial

Subsidi juga berkaitan erat dengan teori distribusi dalam ekonomi. Menurut John Rawls dalam pemikiran keadilannya, intervensi pemerintah seperti subsidi sah dilakukan apabila kebijakan tersebut menguntungkan kelompok paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dalam konteks ini, subsidi dipandang sebagai alat pemerataan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, terutama dalam hal akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, energi, dan pendidikan. Ekonom klasik seperti Adam Smith maupun tokoh neoklasik seperti Arthur Pigou mengakui bahwa dalam beberapa situasi, pasar tidak selalu menghasilkan distribusi yang adil. Oleh karena itu, subsidi dipandang sebagai instrumen korektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan keadilan sosial. Namun, efektivitas subsidi dalam mencapai tujuan redistribusi sangat tergantung pada ketepatan sasarannya. Jika subsidi lebih banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi atas, maka tujuan keadilan justru gagal tercapai dan kebijakan tersebut malah memperbesar ketimpangan.

3. Teori Kesejahteraan (*Welfare Economics*)

Teori ekonomi kesejahteraan membahas bagaimana sumber daya dapat dialokasikan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kerangka ini, subsidi bisa menjadi alat untuk mengoreksi kegagalan pasar (*market failure*), misalnya ketika suatu barang penting seperti energi tidak terjangkau oleh masyarakat miskin. Konsep surplus konsumen dan produsen menjadi penting dalam teori ini. Subsidi meningkatkan surplus konsumen dengan menurunkan harga yang harus dibayar, sehingga daya beli meningkat. Namun, di sisi lain, subsidi juga menimbulkan "*deadweight loss*", yaitu kerugian efisiensi karena penggunaan sumber daya yang tidak optimal. Ekonom seperti Vilfredo Pareto menekankan bahwa kebijakan yang baik seharusnya meningkatkan kesejahteraan setidaknya satu pihak tanpa merugikan pihak lain. Dalam banyak kasus, subsidi gagal memenuhi kriteria Pareto optimal karena harus dikompensasi dengan pajak atau pengurangan anggaran di sektor lain.

4. Teori Eksternalitas dan Subsidi sebagai Koreksi

Dalam teori eksternalitas, subsidi digunakan untuk memperbaiki situasi di mana manfaat sosial suatu kegiatan lebih besar dari manfaat privatnya. Misalnya, penggunaan energi bersih menghasilkan manfaat lingkungan yang luas, namun secara individu mungkin lebih mahal. Dalam kasus seperti ini, subsidi diberikan untuk mendorong aktivitas yang

menguntungkan masyarakat secara luas namun kurang menguntungkan secara finansial bagi pelaku individu.

Dampak Positif Subsidi Energi Terhadap Masyarakat

1. Meringankan Beban Biaya Hidup

Subsidi energi berperan penting dalam mengurangi tekanan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam konteks rumah tangga miskin, pengeluaran untuk energi seperti listrik, gas elpiji, dan bahan bakar minyak sering kali menghabiskan sebagian besar dari total pendapatan bulanan mereka. Dengan adanya subsidi, harga jual energi di bawah harga pasar yang sebenarnya, sehingga rumah tangga miskin tidak perlu mengeluarkan biaya sebesar yang seharusnya. Ini tentu memberikan ruang dalam pengeluaran mereka untuk memenuhi kebutuhan lain yang juga penting, seperti makanan bergizi, layanan kesehatan dasar, pendidikan anak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Sebagai contoh, elpiji 3 kg yang disubsidi pemerintah menjadi sangat krusial bagi ibu rumah tangga di desa maupun kota, karena menjadi sumber energi utama untuk memasak. Tanpa subsidi, harga elpiji 3 kg bisa jauh lebih mahal dan tidak terjangkau. Demikian juga dengan subsidi listrik untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA, yang sangat membantu masyarakat miskin tetap bisa mengakses penerangan dan listrik rumah tangga dengan harga terjangkau. Penghematan ini bisa sangat berarti bagi mereka yang hanya memiliki penghasilan di bawah UMR.

Dengan demikian, subsidi energi secara langsung meningkatkan kemampuan ekonomi rumah tangga miskin untuk bertahan dan mengurangi kemungkinan mereka jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan.

2. Meningkatkan Daya Beli dan Konsumsi

Subsidi energi tidak hanya menurunkan biaya hidup, tetapi juga berfungsi sebagai stimulus ekonomi karena meningkatkan daya beli masyarakat. Ketika biaya energi turun akibat subsidi, maka masyarakat memiliki lebih banyak uang yang bisa mereka belanjakan untuk kebutuhan lain. Hal ini menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang mendorong konsumsi domestik, yang pada akhirnya memutar roda perekonomian nasional, khususnya di sektor informal dan UMKM.

Dalam konteks rumah tangga miskin, tambahan uang dari penghematan biaya energi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas konsumsi, seperti membeli makanan yang lebih bergizi, membeli perlengkapan sekolah anak-anak, atau bahkan modal kecil untuk usaha

rumahan. Efek psikologis dari peningkatan daya beli ini juga berdampak positif karena menumbuhkan rasa aman dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

Dari perspektif makroekonomi, daya beli yang meningkat ini mendorong aktivitas ekonomi lokal, terutama di pasar tradisional dan warung kecil, yang merupakan denyut ekonomi rakyat. Oleh karena itu, subsidi energi bisa menjadi alat intervensi fiskal yang efektif dalam menjaga kestabilan konsumsi dan menjaga pertumbuhan ekonomi, terutama pada saat inflasi tinggi atau terjadi gejolak harga energi global.

3. Mendukung Pertumbuhan Sektor Ekonomi Tertentu

Subsidi energi juga memberikan dampak positif pada sektor-sektor tertentu dalam ekonomi, terutama sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan industri kecil-menengah. Banyak pelaku di sektor ini yang bergantung pada energi—baik bahan bakar maupun listrik untuk menjalankan aktivitas produksinya. Misalnya, petani membutuhkan solar untuk mengoperasikan mesin pompa air, nelayan membutuhkan BBM untuk kapalnya, dan pengrajin membutuhkan listrik untuk menjalankan peralatan produksi.

Jika harga energi tinggi, maka biaya produksi akan meningkat dan margin keuntungan mereka akan menyusut. Kondisi ini bisa membuat usaha kecil menjadi tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, subsidi energi membantu menjaga keberlangsungan usaha kecil dan menengah, yang sebenarnya menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Di sisi lain, ketika usaha kecil tetap bertahan dan bahkan berkembang karena biaya energi yang rendah, hal ini akan menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin, dan pada akhirnya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pelaksanaan Subsidi Energi Di Indonesia

1. Alokasi Anggaran Subsidi Energi

Setiap tahun, Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk subsidi energi. Hal ini menunjukkan bahwa negara menganggap penting fungsi subsidi dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, khususnya bagi masyarakat rentan. Pada tahun 2024, anggaran subsidi energi mencapai Rp186,9 triliun, yang terdiri atas Rp113,3 triliun untuk subsidi BBM dan LPG, serta Rp73,6 triliun untuk subsidi listrik. Angka ini terus meningkat pada 2025 menjadi Rp203,41 triliun karena berbagai faktor, termasuk kenaikan harga minyak global, nilai tukar rupiah, dan tingginya permintaan energi domestik.

Besarnya alokasi ini menunjukkan bahwa subsidi energi tidak bisa dianggap sebagai beban semata, melainkan sebagai instrumen strategis dalam menjaga daya beli rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menghindari konflik sosial. Namun, anggaran yang besar ini juga menimbulkan tekanan fiskal yang cukup besar, sehingga efisiensi dalam penyalurannya menjadi sangat penting.

2. Fokus pada Subsidi yang Tepat Sasaran

Salah satu tantangan besar dalam pelaksanaan subsidi energi di Indonesia adalah ketidaktepatan sasaran. Selama bertahun-tahun, subsidi energi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas karena mereka mengonsumsi energi dalam jumlah yang lebih besar. Sebagai contoh, pemilik kendaraan pribadi lebih banyak menggunakan BBM bersubsidi dibandingkan masyarakat miskin yang bahkan tidak memiliki kendaraan.

Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah melakukan berbagai reformasi kebijakan, seperti menggunakan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk menyeleksi penerima subsidi LPG 3 kg dan listrik bersubsidi. Sejak awal 2024, pembelian elpiji 3 kg harus menggunakan KTP dan terhubung dengan sistem MyPertamina untuk memastikan hanya masyarakat yang berhak yang bisa mengakses subsidi.

Langkah ini penting untuk memastikan keadilan sosial dan agar anggaran subsidi benar-benar menyentuh sasaran, yaitu rumah tangga miskin, nelayan kecil, petani, dan pelaku UMKM. Efektivitas subsidi akan jauh lebih tinggi jika bisa difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

3. Tantangan dalam Pelaksanaan

Meskipun niat dan kebijakan subsidi energi terdengar ideal, pelaksanaannya di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Pertama, masih terjadi kebocoran dalam distribusi subsidi, seperti penimbunan dan penjualan kembali LPG bersubsidi oleh pihak yang tidak berhak. Kedua, ketergantungan pada subsidi energi menghambat inovasi energi terbarukan dan efisiensi energi karena masyarakat sudah merasa nyaman dengan harga yang murah.

Ketiga, dari sisi fiskal, beban subsidi yang besar dapat mengurangi alokasi anggaran untuk sektor lain yang juga penting, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Jika tidak dikendalikan, subsidi bisa menjadi tidak berkelanjutan secara jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah berusaha menyeimbangkan antara memberikan bantuan yang tepat sasaran sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal negara.

Reformasi subsidi energi memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta transparansi dan pengawasan ketat. Diperlukan juga edukasi kepada masyarakat bahwa subsidi energi adalah bantuan yang bersifat selektif, bukan hak mutlak semua warga negara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Subsidi energi merupakan kebijakan strategis yang telah lama diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Melalui pemberian subsidi terhadap BBM, LPG 3 kg, dan tarif listrik, pemerintah berupaya menjaga keterjangkauan energi serta mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin.

Hasil kajian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa subsidi energi memberikan manfaat langsung yang signifikan, seperti meringankan beban biaya hidup, meningkatkan daya beli, dan mendukung pertumbuhan sektor ekonomi rakyat. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menghadapi tantangan serius terutama dalam hal ketepatan sasaran. Data menunjukkan bahwa sebagian besar subsidi justru dinikmati oleh kelompok rumah tangga menengah dan atas yang memiliki konsumsi energi lebih tinggi. Ketimpangan ini menyebabkan subsidi kurang efektif dalam menjalankan fungsi pemerataan kesejahteraan.

Selain itu, subsidi energi juga membebani fiskal negara karena memerlukan alokasi anggaran yang sangat besar setiap tahunnya. Beban ini dapat menghambat pengembangan sektor-sektor penting lainnya serta mengurangi kemampuan negara dalam melakukan transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan efisien. Salah satu solusi yang diajukan adalah pengalihan subsidi menjadi bantuan langsung tunai berbasis data sosial (DTKS), agar benar-benar menasar masyarakat miskin dan rentan. Reformasi ini penting tidak hanya untuk efisiensi anggaran, tetapi juga untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang adil dan berkelanjutan.

5. DAFTAR REFERENSI

- Ardiansyah, R. (2021). Subsidi energi dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bisnis.com. (2023, Desember 9). Subsidi energi 2024 dipatok Rp186,9 triliun, ini rinciannya. Bisnis.com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241209/10/1822867/subsidi-energi-2024-dipatok-rp1869-triliun-ini-rinciannya>
- Febriany, V., & Savitri, L. A. (2018). Efektivitas subsidi energi terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 18(2), 115–130.
- Handayani, R., Sulastri, & Kholis, N. (2022). Subsidi: Manfaat atau Beban? Dampaknya terhadap Ekonomi Indonesia. Universitas Negeri Surabaya. (<https://pe.feb.unesa.ac.id/post/subsidi-manfaat-atau-beban-dampaknya-terhadap>)

ekonomi-indonesia)

- INDEF. (2023). Dampak Subsidi BBM dan LPG 3 Kg terhadap Kemiskinan Nelayan. Institute for Development of Economics and Finance. <https://indef.or.id/publikasi/dampak-subsidi-bbm-dan-lpg-3-kg-terhadap-kemiskinan-nelayan/>)
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2023). Subsidi LPG 3 Kg Tepat Sasaran Bermanfaat Bagi Masyarakat Miskin. (<https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/subsidi-lpg-3-kg-tepat-sasaran-bermanfaat-bagi-masyarakat-miskin>)
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024). Jaga Daya Beli, Menteri ESDM Targetkan Alokasi Subsidi Energi 2024 Rp186,9 Triliun. (<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/jaga-daya-beli-menteri-esdm-targetkan-alokasi-subsidi-energi-2024-rp1869-triliun>)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Belanja Subsidi Energi Tahun 2024 Capai Rp169,5 Triliun. (<https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/masyarakat-pun-menikmati-apbn%3A-belanja-subsidi-energi-tahun-2024-capai-rp169%2C5-triliun>)
- Kompas.id. (2024, Mei 15). Otak-atik cara kurangi beban subsidi energi Rp 400 triliun. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/otak-atik-cara-kurangi-beban-subsidi-energi-rp-400-triliun>
- Kumparan Bisnis. (2025, Mei 21). Sri Mulyani Pastikan Subsidi Energi Berlanjut di 2026, Fokus Tepat Sasaran. (<https://kumparan.com/kumparanbisnis/sri-mulyani-pastikan-subsidi-energi-berlanjut-di-2026-fokus-tepat-sasaran-256wy d8wYTB>)
- Media Indonesia. (2024, Februari 29). Elpiji 3 kg hanya untuk warga terdaftar di DTKS dan MyPertamina. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/644339/elpiji-3-kg-hanya-untuk-warga-terdaftar-di-dtks-dan-mypertamina>
- Nurdianto, D., & Resosudarmo, B. P. (2011). Dampak pengurangan subsidi energi terhadap distribusi pendapatan di Indonesia: Analisis menggunakan model computable general equilibrium (CGE). *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 12(1), 1–17. <https://doi.org/10.21002/jepi.v12i1.149>
- Paramita, A. (2023). Potensi Subsidi Energi Dalam Mengurangi Kemiskinan. *Jurnal Humaniora*, Universitas Abulyatama. (<https://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora/article/view/979>)
- Smeru Research Institute. (2022). Mengestimasi Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan: Bukti dari Indonesia. (<https://smeru.or.id/id/publication-id/mengestimasi-dampak-kenaikan-harga-bbm-terhadap-kemiskinan-dan-ketimpangan-bukti>)
- Universitas Sumatera Utara. (2024). Dampak Subsidi Energi: Menilai Efektivitas dan Konsekuensinya. (<https://bktaruna.uma.ac.id/dampak-subsidi-energi-menilai-efektivitas-dan-konsekuensinya/>)
- Universitas Syiah Kuala. (2023). Pengaruh Subsidi Energi terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 8(1). (<https://jim.usk.ac.id/EKP/article/view/8933>)